

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Visi dalam hal ini adalah visi pemerintahan Nagari, yaitu visi Wali Nagari. Visi pemerintahan Nagari pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan datang yang akan diwujudkan oleh pemerintahan Nagari dalam periode 2018 – 2024.

Fungsi visi pemerintah Nagari, terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah Nagari dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan slogan tetapi visi diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya.

Berdasarkan masalah dan potensi dan harapan masa depan maka pemerintah Nagari Siguntur Tua dalam periode 2018 – 2024 menetapkan visi sebagai berikut :

“Terbangunnya tata kelola pemerintahan Nagari yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat Nagari yang adil , makmur dan sejahtera”

Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemerintahan yang baik dan bersih yaitu Pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan secara transparan dan meningkat kualitas pelayanan pada masyarakat.
2. Nagari Makmur yaitu nagari yang mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan segala bidang tanpa bergantung dari hanya dari satu hasil Pertanian.
3. Mensejahterakan masyarakat yaitu kebijakan pembangunan nagari yang mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi baru sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

4.1.2. Misi

Misi dalam hal ini adalah misi Wali Nagari. Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi. Misi merupakan bidang bidang yang akan diarungi untuk tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi juga dapat berupa output, yaitu output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi. Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud.

Untuk mewujudkan Visi Wali Nagari sebagaimana rumusan di muka, maka dirumuskan Misi (beban kerja yang harus dilaksanakan) sebagai berikut :

- a. Melakukan Reformasi system guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. Menyelenggarakan pemerintahan Nagari Secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Menyelenggarakan pemerintahan Nagari yang bersih, bebas korupsi serta beentuk penyelewengan lainnya
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana umum nagari;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pemahaman dan pengalaman norma-norma agama dan adat istiadat;
- f. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat;
- g. Peningkatan peran serta masyarakat untuk kemajuan pembangunan nagari.
- h. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM, Wiraswasta dan petani
- i. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga terwujudnya masyarakat maju dan mandiri

Rumusan misi tersebut diatas dapat dijelaskan atau dijabarkan yaitu sebagai berikut :

❖ Misi 1

Menciptakan suatu kelembagaan pemerintahan yang mengacu kepada prinsip-prinsip manajemen antara lain efisien dan efektif serta prinsip “*Clean Government*” yaitu pemerintah yang bersih. Oleh karena itu aparat pemerintah Nagari dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus secara profesional, produktif dan transparan secara akuntabel. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan Nagari yang berkelanjutan, pembangunan pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara sumber daya, teknologi dan kebijakan.

Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sebagai sumber daya sekaligus sebagai pengambil manfaat dari pembangunan maka diperlukan manusia-manusia yang cerdas dan memiliki moral yang tinggi.

paya konkrit untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pendapatannya.

❖ Misi 2

Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan masyarakat Nagari yang demokrasi dan agamis.

Pembangunan demokrasi umumnya akan menyentuh politik/kekuasaan, hak dan kewajiban serta Hak Asasi Manusia. Sedangkan pembangunan dibidang keagamaan adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang agamis yang akan bermuara pada terbentuknya moral masyarakat yang tinggi, namun demikian kedua aspek kehidupan tersebut tidak bisa berkembang manakala selalu ada gangguan, baik gangguan alam maupun konflik dalam masyarakat dengan kata lain tidak ada rasa aman dan tentram dalam masyarakat. Rasa aman dan tentram juga mendorong produktivitas masyarakat lebih tinggi.

Tujuan pemerintah secara garis besar ada 3 (tiga) hal yaitu membina/mengembangkan, membangun/memberdayakan dan melindungi seluruh masyarakat.

❖ Misi 3

Meningkatkan sumber-sumberpendanaan pemerintah Nagari untuk optimalisasi pembangunan sarana prasarana Nagari dan menunjang kesejahteraan masyarakat.

Dana bagi penyelenggaraan pemerintahan Nagari merupakan elemen mutlak yang harus ada. Visi dan Misi tidak akan terwujud tanpa tersedianya dana.

Oleh karena itu pemerintah yang kuat ditandai oleh cukup dan beragamnya sumber-sumber dana yang dimilikinya.

Tujuan pokok dalam kaitannya dengan penyediaan sumber dana adalah mengembangkan sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan Nagari dengan menggali, mengoptimalkan pendapatan asli Nagari dan menggerakkan swadaya masyarakat Nagari dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah atas Nagari.

Pembangunan pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan masyarakat, dalam alam demokrasi diharapkan peranan masyarakat lebih dominan dalam pelaksanaan pembangunan Nagari. Sebagai upaya menuju sasaran tersebut maka salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat lebih terprogram dan terarah, disisi lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat perlu kemitraan dengan pihak lain. Kemitraan tidak hanya memperkuat dalam hal pendanaan, tetapi dalam kemitraan akan terjadi transfer pengetahuan, teknologi dan manajemen yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas usaha.

Mengembangkan perekonomian Nagari merupakan salah satu masalah yang mendasar yang dihadapi dalam pembangunan Nagari. Sebagai dampak krisis ekonomi adalah besarnya tingkat pengangguran yang bermuara dengan makin meningkatnya jumlah penduduk miskin. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan mendasar tersebut adalah menggerakkan sektor perekonomian Nagari dengan memperluas akses masyarakat Nagari ke sumber-sumber daya produktif untuk mengembangkan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan pasar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Siguntur Tua Periode 2018 – 2024

Dari uraian tersebut diatas, maka pencapaian misi Wali Nagari dapat diindikasikan sebagai berikut :

- a. Keimanan dan ketaqwaan sebagai pegangan hidup
- b. Penataan administrasi pemerintahan Nagari
- c. Pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat Nagari
- d. Peningkatkan sumber daya manusia sesuai kemajuan zaman
- e. Pengelolaan sumber daya nagari sebagai faktor yang mendukung pembangunan
- f. Pelestarian azaz gotong royong masyarakat
- g. Koordinasi pemerintahan Nagari dan kelembagaan Nagari
- h. Tanggungjawab tugas pemerintahan Nagari kepada pemerintah yang diatasnya
- i. Saling memahami antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan Nagari
- j. Terselenggaranya tugas –tugas pemerintah Nagari secara efektif
- k. Tersusunnya program-program pembangunan Nagari secara efektif dan efisien
- l. Pengalokasian anggaran yang efektif berdasarkan skala prioritas
- m. Terlaksananya pengawasan melekat yang efektif
- n. Meningkatnya jumlah dan keragaman sumber-sumber pendanaan Nagari meningkatnya kemandirian masyarakat, terutama dalam bidang pendanaan pembangunan
- o. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
- p. Meningkatnya kemampuan masyarakat mengakses ke sumber sumber daya termasuk informasi
- q. Meningkatnya usaha kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat
- r. Meningkatnya tingat pendidikan masyarakat
- s. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat
- t. Berkembangnya produktifitas sektor pertanian dan sektor sektor riil ekonomi Nagari.

Arah kebijakan pembangunan Nagari merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Wali nagari terpilih sebagai arah bagi aparat pemerintah Nagari, guna

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Siguntur Tua Periode 2018 – 2024

mencapai kinerja sesuai tugas dan fungsinya. Arah kebijakan nagari, umumnya akan memuat arahan-arahan yang berorientasi pada :

1. Peningkatan produktifitas sector riil ekonomi nagari
2. Peningkatan kelembagaan pemerintahan nagari
3. Peningkatan peran lembaga-lembaga kemasyarakatan nagari sebagai mitra pemerintahan nagari.
4. Peningkatan kualitas prasarana terhadap umum/kenyamanan.
5. Peningkatan infrastruktur ekonomi nagari
6. Peningkatan peran serta masyarakat
7. Peningkatan iman,taqwa dan moral
8. Peningkatan perlindungan anak terlantar, penyandang masalah sosial, ekonomi dan sejenisnya
9. Peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat
10. Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda
11. Peningkatan keamanan dan ketertiban /ketentraman dan kewaspadaan terhadap bencana
12. Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi
13. Peningkatan budaya/gerakan efisien,efektifitas,disiplin, berprestasi
14. Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi
15. Peningkatanbudaya/gerakan fisien,efektifitas,disiplin, berprestasi.
16. Peningkatan kualitas lingkungan
17. Peningkatan kesempatan kerja/lapangan kerja
18. Kecukupan energi dan air bersih
19. Peningkatan peran kaum Perempuan
20. Penguasaan informasi teknologi

Secara rinci arah kebijaksanaan umum beberapa sektor penting adalah sebagai berikut :

1. Pertanian

Arah kebijakan umum pembangunan pertanian adalah kecukupan pangan,penganekaragaman komoditas, fasilitas pemberdayaan petani miskin dan peningkatan pendapatan petani.

2. Pendidikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Siguntur Tua Periode 2018 – 2024

Arah kebijakan umum pembangunan pendidikan adalah peningkatan melek huruf, khususnya wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan.

3. Kesehatan

Arah kebijakan umum pembangunan kesehatan adalah penurunan angka kematian kasar (bayi dan ibu hamil), peningkatan gizi anak, peningkatan kesehatan lingkungan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin.

4. Perekonomian Desa

Arah kebijakan umum perekonomian nagari adalah peningkatan lapangan kerja, penganekaragaman usaha ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pemanfaatan potensi ekonomi nagari yang berkelanjutan.

5. Lingkungan hidup

Arah kebijakan umum pengembangan lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup ditingkat nagari.

6. Pemerintahan Nagari

Arah kebijakan umum kegiatan pemerintahan Nagari adalah penataan kelembagaan pemerintah nagari, peningkatan kinerja aparatur pemerintah nagari, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan nagari, penguatan dalam pendanaan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

7. Sosial Budaya

Arah kebijakan umum di bidang sosial budaya adalah sebagai berikut :

- a. Terbentuknya masyarakat yang inovatif, kreatif dan informatif
- b. Terbentuknya masyarakat yang tentram , tertib ,disiplin , beretos kerja tinggi ,agamis dan bermoral
- c. Peningkatan peran wanita dalam pelaksanaan pembangunan nagari
- d. Terbentuknya masyarakat yang bebas dari gangguan alam dan penyakit social
- e. Pemeliharaan adat istiadat dan seni budaya asli daerah

8. Agama

Arah kebijakan umum dan kehidupan beragama, bermasyarakat, mencerminkan kerukunan hidup beragama.

9. Keuangan Nagari

Keuangan nagari adalah semua hak dan kewajiban nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik nagari sehubungan dengan pelayanan hak dan kewajiban nagari.

Implementasi keuangan nagari setiap tahun dituangkan dalam peraturan nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari). APB Nagari merupakan alat akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan nagari.

4.2. Kebijakan Pembangunan

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari

Secara Administratif Nagari Siguntur Tua terbagi dalam 2 (dua) kampung, yaitu kampung Siguntur Tuo dan kampung Tarandam. Pelaksana pembangunan antar wilayah barat dan wilayah timur harus seimbang agar tidak terjadi kecemburuan yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Demi tercapainya azas “adil dan merata” tersebut pembangunan dilaksanakan bertahap dan bergantian antara wilayah barat dan wilayah timur meskipun dalam pelaksanaannya pembangunan harus melibatkan warga masing-masing wilayah agar tercipta rasa saling memiliki meskipun pembangunan tersebut berlokasi di wilayah kampung lain. Selain azas “adil dan merata”, kami juga lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat darurat atau membutuhkan penanganan yang tidak bisa ditunda. Untuk mendukung semua rencana kegiatan ini tentu harus dibantu dengan kebijakan pengelolaan pendapatan Nagari, pengelolaan belanja Nagari, serta kebijaksanaan umum anggaran Nagari. Sumber pendapatan Nagari berasal dari pajak yang dipungut oleh kolektor pajak di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari sesuai dengan wilayah masing-masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Wali Nagari ke Bank Nagari atau langsung ke Badan Pendapatan. Adakalanya petugas dari kabupaten datang sendiri untuk menagih pajak ke Nagari sekaligus untuk mengevaluasi

pencapaian realisasi pajak di Nagari. Sementara itu arah pengelolaan belanja Nagari bermuara pada:

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari

Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari terdiri dari berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
- b. Kegiatan Operasional Kantor Wali Nagari
- c. Kegiatan Operasional Bmus Nagari
- d. Kegiatan Operasional RT/RW
- e. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari
- f. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari
- g. Kegiatan Pengelolaan Informasi/Profil Nagari
- h. Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Nagari
- i. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- j. Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor
- k. Kegiatan Operasional Raskin
- l. Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB
- m. Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari/Bamus
- n. Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari
- o. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
- p. Operasional Linmas Nagari
- q. Kegiatan Pendataan dan Registrasi Rumah Penduduk
- r. Kegiatan Partisipasi Lomba Nagari
- s. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- t. Kegiatan Lainnya Sesuai Kebutuhan dan Kondisi Nagari

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Pada bidang pelaksanaan pembangunan Nagari terdiri dari berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi
- b. Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Siguntur Tua Periode 2018 – 2024

- c. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor
- d. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial
- e. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- f. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- g. Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan
- h. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat
- i. Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- j. Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Aparatur Nagari
- k. Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Masyarakat
- l. Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih
- m. Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro
- n. Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa
- o. Kegiatan pembangunan pariwisata
- p. Kegiatan Pembangunan Jembatan
- q. Kegiatan Pembangunan Bronjong
- r. Kegiatan Pembangunan Drainase
- s. Kegiatan Pendirian BUMNAG
- t. Kegiatan Pembangunan Ekonomi Produktif
- u. Kegiatan Pembangunan Pengamanan Tebing Sungai/Bukit
- v. Pembuatan Website Nagari
- w. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
- x. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Tidak Layak Huni
- y. Kegiatan Lainnya Sesuai Kebutuhan dan Kondisi Nagari

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

Pada bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari terdiri dari berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
- b. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
- c. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya

- d. Kegiatan Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan
- e. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
- f. Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini/TK
- g. Kegiatan Pembinaan LPMN
- h. Kegiatan Peningkatan Nilai Keagamaan
- i. Kegiatan Pembinaan Kader Yandu/KB
- j. Kegiatan Pembinaan KPMN
- k. Kegiatan Lainnya Sesuai Kebutuhan dan Kondisi Nagari

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Pada bidang pemberdayaan masyarakat Nagari terdiri dari berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat
- b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
- c. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT
- d. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- e. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan
- f. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna
- g. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
- h. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong
- i. Kegiatan Pemberdayaan TP-PKK Nagari
- j. Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
- k. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
- l. Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMNAG
- m. Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup
- n. Kegiatan Penyusunan Profil Nagari/Data Nagari
- o. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- p. Kegiatan Pemasyarakatan Olahraga
- q. Kegiatan Lainnya Sesuai Kebutuhan dan Kondisi Nagari

V. Bidang Penanggulangan Bencana

Pada bidang tak terduga terdiri dari berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
- b. Kegiatan Penanggulangan Bencana Lainnya Sesuai dengan Keadaan

Semua yang tersebut diatas diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari. Sementara kebijakan umum anggaran, pemerintah Nagari bersama Bamus melaksanakan musyawarah guna membahas Anggaran yang dibutuhkan 1 (satu) tahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari.

4.2.2. Potensi dan Masalah

Mengacu pada potensi dan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka jika dihubungkan dengan kebijakan pembangunan paling tidak ada **3 isu strategis** yang harus di perhatikan agar kebijakan pembangunan tersebut tidak salah arah. 3 hal penting yang dimaksud adalah :

- a. Kebijakan pembangunan harus mengarah pada pembangunan Infrastruktur jalur transportasi, karena disana ada potensi lahan-lahan perkebunan akan tetapi masalahnya adalah tidak layaknya jalur transportasi sehingga hasil tani masyarakat tidak dapat menghasilkan Pendapatan yang Maksimal.
- b. Kebijakan pembangunan harus mengarah pada pembangunan manusianya atau peningkatan kapasitas karena disana banyak masyarakat yang memiliki talenta-talenta yang tidak tersalurkan sekaligus merupakan potensi yang ada pada diri masyarakat, akan tetapi masalahnya adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap bakat-bakat yang ada pada masyarakat tadi, akan tetapi belum memiliki keterampilan yang professional sehingga membutuhkan tambahan-tambahan ilmu dan pengalaman
- c. Kebijakan pembangunan harus mengarah meningkatkan kesejahteraan lewat bantuan dana-dana simpan pinjam perempuan atau dana usaha ekonomi produktif, karena di sana ada potensi dimana banyak masyarakat mempunyai usaha baik dalam skala kecil maupun skala besar akan tetapi masalahnya adalah kurangnya modal usaha.

4.2.3. Program Pembangunan Nagari

Program Pembangunan yang ada di Nagari Siguntur Tua terdiri dari berapakegiatan, antara lain : (Terlampir)

- a. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi
- b. Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari
- c. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor
- d. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial
- e. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- f. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- g. Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan
- h. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat
- i. Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- j. Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Aparatur Nagari
- k. Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Masyarakat
- l. Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih
- m. Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro
- n. Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa
- o. Kegiatan Pembangunan jamban Sehat
- p. Kegiatan Pembangunan Jembatan
- q. Kegiatan Pembangunan Bronjong
- r. Kegiatan Pembangunan Drainase
- s. Kegiatan Pendirian BUMNAG
- t. Kegiatan Pembangunan Ekonomi Produktif
- u. Kegiatan Pembangunan Pengamanan Tebing Sungai/Bukit
- v. Pembuatan Website Nagari
- w. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
- x. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Tidak Layak Huni
- y. Kegiatan Lainnya Sesuai Kebutuhan dan Kondisi Nagari
- z.

4.2.4. Strategi Pencapaian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Siguntur Tua Periode 2018 – 2024

Program Nagari diawali dari musyawarah Nagari yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala kampung, Pemerintah Nagari beserta Bamus dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Nagari dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Sebagai wakil dari masyarakat Bamus berperan aktif membantu pemerintah Nagari dalam menyusun program pembangunan. Pemerintah Nagari beserta Bamus Merumuskan program pembangunan Nagari, dalam hal menyusun pembangunan ada yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas. Dengan demikian apapun yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan harapan dan target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Nagari Siguntur Tua Periode 2018-2024 strategi pembangunan nagari yang dilaksanakan meliputi :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang baik dan bersih (*good govermence and clean govermence*)
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahan nagari.
3. Meningkatkan sumber- sumber pendanaan pembangunan nagari.
4. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan nagari dan administrasi nagari.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset/kekayaan nagari.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan umum
7. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat
8. Meningkatkan fungsi kelembagaan dalam masyarakat,
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kewaspadaan terhadap bencana alam
10. Meningkatkan kualitas lingkungan.
11. Menfasilitasi dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat nagari.
12. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan.
13. Meningkatkan kenyamanan menjalankan ibadah
14. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Siguntur Tua Periode 2018 – 2024

15. Meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi pedesaan.
16. Meningkatkan budaya disiplin dalam masyarakat
17. Meningkatkan ketaatan terhadap hukum peraturan
18. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber daya termasuk komunikasi